

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025,
- c. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019,
- d. Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
- e. Rancangan Renstra awal 2017-2022 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta
- f. Mempertimbangkan isu-isu yang berkembang.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 adalah **“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**. Pendekatan Penyusunan RKP RI tahun 2019 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan prinsip *Money Follows Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan holistik-tematik, integratif dan spasial dengan memperhatikan pada :

- Pengendalian Perencanaan;
- Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2019;
- Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan;
- Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Adapun Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2019 terdiri dari 10 Prioritas dan 30 Program Prioritas antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan
 1. Pendidikan Vokasi
 2. Peningkatan Kualitas Guru
2. Kesehatan
 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan anak
 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
 5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan dan Pemukiman
 6. Penyediaan Perumahan Layak
 7. Air Bersih dan Sanitasi

4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
 10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
5. Ketahanan Energi
 13. EBT dan Konservasi Energi
 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. Ketahanan Pangan
 15. Peningkatan Produksi Pangan
 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)
7. Penanggulangan Kemiskinan
 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
 18. Pemenuhan Kebutuhan dasar
 19. Perluasan akses usaha mikro, kecil dan koperasi
8. Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman
 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
9. Pembangunan Wilayah
 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
 23. Pembangunan Perdesaan
 24. Reforma Agraria
 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
 26. Percepatan Pembangunan Papua

10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

- 27. Penguatan Pertahanan
- 28. Stabilitas Politik dan Keamanan
- 29. Kepastian Hukum
- 30. Reformasi Birokrasi

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 adalah “Peningkatan Kualitas SDM Menuju Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agribahari dan Berdaya Saing”. sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur tersebut, maka pembangunan daerah tahun 2019 diarahkan pada upaya pemantapan ekonomi masyarakat dengan kemandirian dan keadilan diberbagai kawasan yang ditandai dengan mulai meratanya hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Makna tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:

1. Kualitas SDM adalah suatu peranan penting dalam upaya untuk memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAQ yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk mempersiapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai “pemain/subjek” dan bukan “penonton/objek” dari pesatnya pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Mandiri menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan.

3. Pembangunan Ekonomi dimaknai dengan pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui strategi yang dilaksanakan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.
4. Berbasis agribahari adalah cerminan untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah agri bahari yang dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah yaitu pertanian (agrikultur) dan kelautan perikanan. Agrikultur, dimaknai secara luas meliputi sub sektor pertanian rakyat, perkebunan, perikanan dan pengembangan potensi peternakan. Sementara itu, kebaharian diterjemahkan tidak hanya terkait dengan hasil perikanan laut saja melainkan juga potensinya di sektor transportasi (pelabuhan) serta kepariwisataan beserta sektor-sektor pendukungnya.
5. Daya saing dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:

1. Peningkatan Ekonomi;
2. Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik;
4. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat;
5. Pembangunan Berdemokrasi;
6. Penanggulangan Bencana;

3.2 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 dapat di lihat pada tabel III.1 (terlampir)